

Analisis Kesenjangan Sarana Prasarana Pendidikan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Zakiatul Munawwarah
Universitas Islam Indragiri
zakiatulmunawwarahmuna@gmail.com
Lisna Wati
Universitas Islam Indragiri
lisnawaty616@gmail.com
Ahmad Riyaldi
Universitas Islam Indragiri
riyaldiahmad30@gmail.com
Irjus Indrawan
Universitas Islam Indragiri
irjus9986@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
24-06-2026	21-07-2026	01-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the disparity of educational facilities and infrastructure between urban and rural areas and to identify the factors influencing it. The research employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that there are significant differences in the availability and quality of educational facilities and infrastructure between the two areas. Schools in urban areas generally have more complete facilities, better building conditions, and adequate access to technology, while schools in rural areas still face limitations in facilities, inadequate infrastructure, and low access to information technology. This disparity is influenced by economic, geographical, and social factors, as well as the suboptimal implementation of government policies in achieving educational equity. The impact of this disparity is reflected in differences in the quality of learning processes and educational outcomes of students. Therefore, strategic and sustainable efforts are needed to improve the equitable distribution of educational facilities and infrastructure in order to create a fair, inclusive, and high-quality education system.

Keyword: *Educational Disparity, Facilities and Infrastructure, Urban and Rural Areas*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan antara kedua wilayah tersebut. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, kondisi bangunan yang layak, serta akses teknologi yang memadai, sementara sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya akses terhadap teknologi informasi. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, sosial, serta belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Dampak dari kesenjangan tersebut terlihat pada perbedaan kualitas proses pembelajaran dan hasil pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Perkotaan dan Pedesaan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan suatu sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tenaga pendidik, dan metode pembelajaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan efisien sehingga mampu meningkatkan motivasi serta hasil belajar peserta didik.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi permasalahan serius, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium lengkap, perpustakaan modern, akses teknologi informasi, serta media pembelajaran yang inovatif. Sebaliknya, di daerah pedesaan masih banyak ditemukan keterbatasan fasilitas, seperti ruang kelas yang tidak memadai, minimnya alat peraga pendidikan, kurangnya akses terhadap teknologi digital, serta kondisi bangunan sekolah yang kurang layak.¹

Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kondisi fisik antar wilayah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran. Peserta didik di daerah perkotaan cenderung memperoleh pengalaman belajar yang lebih variatif dan interaktif, sementara peserta didik di pedesaan seringkali menghadapi keterbatasan yang menghambat optimalisasi potensi mereka. Hal ini pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan dan berimplikasi pada ketimpangan sosial di masa depan.

Selain itu, kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan alokasi anggaran, kebijakan pemerintah yang belum merata, kondisi geografis, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Daerah pedesaan yang terpencil seringkali menghadapi tantangan aksesibilitas, sehingga distribusi fasilitas pendidikan menjadi tidak optimal. Di sisi lain, daerah perkotaan yang lebih maju cenderung mendapatkan prioritas dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan.²

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program, seperti pembangunan

¹ J A M Rawis et al., "Transformasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Teoritis Dan Pendekatan Strategis Di Era Digital," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1213>. h. 55

² N Astuti and S Maisaroh, "Problematisasi Minimnya Sarana Dan Prasarana Di Sekolah 3T," *Jurnal Pendas* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.28351>. h. 91

sekolah, bantuan operasional sekolah (BOS), serta digitalisasi pendidikan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan, distribusi, maupun efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi sejauh mana kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan masih terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Analisis kesenjangan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami perbedaan kondisi antara daerah perkotaan dan pedesaan, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis untuk mengurangi ketimpangan tersebut, baik melalui peningkatan alokasi anggaran, pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan, maupun pemanfaatan teknologi sebagai alternatif pembelajaran.³

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Tanpa adanya pemerataan sarana dan prasarana, tujuan tersebut akan sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama dalam konteks pembangunan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah menganalisis kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan literatur yang tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen kebijakan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data tersebut mencakup jurnal nasional maupun internasional, buku-buku pendidikan, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan pendidikan, serta kesenjangan pendidikan antara

³ M N G Jaelani, Zulfitria, and Y Prapantja, "Transformasi Digital Pendidikan Dasar Dan Kesenjangan Layanan Di Indonesia," *EDUTECH*, 2025, <https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech/article/view/96662>. h. 242

wilayah perkotaan dan pedesaan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam mendukung pembahasan penelitian.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan memilih informasi yang relevan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap berbagai sumber yang telah dianalisis.⁵

Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan

Dari aspek infrastruktur, terlihat bahwa sekolah di daerah perkotaan memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya konsentrasi pembangunan yang lebih besar di wilayah perkotaan. Pemerintah maupun pihak swasta cenderung lebih mudah mengalokasikan sumber daya di wilayah yang memiliki akses transportasi, komunikasi, dan ekonomi yang lebih baik.

Sebaliknya, daerah pedesaan, terutama yang tergolong terpencil, menghadapi berbagai hambatan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Kondisi geografis seperti jarak yang jauh, akses jalan yang sulit, serta keterbatasan jaringan distribusi menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan pembangunan. Akibatnya, banyak sekolah di pedesaan yang masih memiliki bangunan tidak layak, kekurangan ruang kelas, bahkan ada yang harus melakukan kegiatan belajar dalam kondisi darurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur bukan sekadar

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). h. 66

⁵ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2018). h. 91

persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan.⁶

Dari aspek infrastruktur, terlihat bahwa sekolah di daerah perkotaan memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya konsentrasi pembangunan yang lebih besar di wilayah perkotaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang cenderung memprioritaskan daerah dengan tingkat aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai, jaringan komunikasi yang stabil, serta dukungan ekonomi yang kuat menjadikan wilayah perkotaan lebih mudah dijangkau dalam proses pembangunan dan distribusi fasilitas pendidikan. Akibatnya, sekolah-sekolah di perkotaan umumnya telah memiliki gedung yang permanen, ruang kelas yang cukup, fasilitas sanitasi yang layak, serta sarana pendukung lainnya yang menunjang kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran.

Sebaliknya, daerah pedesaan, terutama yang tergolong terpencil, menghadapi berbagai hambatan serius dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Faktor geografis seperti lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan, kondisi jalan yang rusak atau bahkan tidak tersedia, serta keterbatasan akses transportasi menjadi kendala utama dalam distribusi material dan pembangunan fasilitas sekolah. Selain itu, keterbatasan jaringan listrik dan komunikasi juga turut memperlambat proses pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan. Dalam kondisi tersebut, banyak sekolah di pedesaan yang masih memiliki bangunan semi permanen, ruang kelas yang tidak mencukupi jumlah peserta didik, serta minimnya fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, dan sanitasi yang layak. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara bergantian atau dalam kondisi darurat yang tidak mendukung kenyamanan dan konsentrasi belajar siswa.⁷

Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur pendidikan bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip pemerataan. Perencanaan pembangunan yang masih bersifat sentralistik dan kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah pedesaan menyebabkan distribusi anggaran dan program pembangunan menjadi tidak merata. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi serta kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan juga memperburuk kondisi tersebut. Jika kondisi ini

⁶ A N Azizah, "Kesenjangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan PAUD Di Indonesia," *Early Childhood Education and Development Journal*, 2024, <https://doi.org/10.20961/ecedj.v4i2.60698>. h. 309

⁷ A Wahyudi, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 33

terus dibiarkan, maka kesenjangan infrastruktur pendidikan akan semakin melebar dan berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional.⁸

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan daerah, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah pedesaan dan terpencil. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, meningkatkan alokasi anggaran yang proporsional, serta memastikan distribusi pembangunan yang lebih adil dan merata. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemanfaatan potensi daerah juga menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan, sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Keterbatasan Sarana Pembelajaran

Selain infrastruktur, sarana pembelajaran juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan. Di daerah perkotaan, sekolah umumnya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan digital, serta media pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara lebih interaktif, kreatif, dan inovatif.

Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan sarana pembelajaran masih menjadi masalah utama. Banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium, atau jika ada, kondisinya tidak memadai dan jarang digunakan. Koleksi buku di perpustakaan juga terbatas, sehingga peserta didik kesulitan dalam mengakses sumber belajar yang berkualitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses pembelajaran masih bergantung pada metode konvensional tanpa dukungan media yang memadai. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, di mana siswa di daerah pedesaan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving dibandingkan dengan siswa di daerah perkotaan.⁹

Selain infrastruktur, sarana pembelajaran juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan karena berperan langsung dalam menunjang proses transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi peserta didik. Di daerah perkotaan, sekolah umumnya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan digital, serta media pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dengan

⁸ C Lestari et al., "Kesenjangan Digital Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan," *RISOMA Journal* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.783>.

⁹ H A R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). h. 44

kurikulum. Ketersediaan sarana tersebut memungkinkan guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif, seperti pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), serta pemanfaatan platform digital dalam proses belajar mengajar. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, peserta didik di perkotaan memiliki kesempatan lebih luas untuk belajar secara interaktif, eksploratif, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital.

Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan sarana pembelajaran masih menjadi permasalahan utama yang cukup kompleks. Banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium, atau jika tersedia, kondisinya kurang layak, peralatannya tidak lengkap, serta jarang dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan tenaga pendidik yang terlatih. Perpustakaan sekolah juga seringkali memiliki koleksi buku yang terbatas, kurang relevan dengan perkembangan kurikulum, serta minimnya bahan bacaan penunjang yang dapat memperkaya wawasan peserta didik. Selain itu, keterbatasan akses terhadap media pembelajaran berbasis teknologi menyebabkan proses pembelajaran masih didominasi oleh metode konvensional, seperti ceramah dan penggunaan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di daerah pedesaan. Minimnya sarana pembelajaran menyebabkan siswa kurang terpapar pada pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif, sehingga proses pembelajaran cenderung bersifat teoritis dan kurang menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Akibatnya, kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, serta memecahkan masalah menjadi kurang berkembang dibandingkan dengan siswa di daerah perkotaan yang memiliki akses terhadap fasilitas yang lebih lengkap.¹⁰

Lebih lanjut, kesenjangan sarana pembelajaran ini juga berimplikasi pada rendahnya daya saing peserta didik dari daerah pedesaan, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana pembelajaran di daerah pedesaan, seperti pengadaan fasilitas laboratorium yang memadai, pengembangan perpustakaan berbasis digital, serta pelatihan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran inovatif. Dengan demikian, diharapkan proses pembelajaran di daerah pedesaan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten serta berdaya saing tinggi.

¹⁰ M Z Hafizi et al., "Dampak Kemiskinan Terhadap Sarana Dan Prasarana Pendidikan," *Tamaddun Journal*, 2024, <https://doi.org/10.70115/tamaddun.v2i3.312>. h. 482

Kesenjangan Akses Teknologi (*Digital Divide*)

Dalam era globalisasi dan digitalisasi pendidikan, akses terhadap teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan digital yang cukup tajam antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Sekolah di perkotaan umumnya telah memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan internet, perangkat komputer, proyektor, serta platform pembelajaran daring. Hal ini memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengakses informasi secara luas dan meningkatkan kompetensi digital mereka.

Di sisi lain, sekolah di pedesaan masih menghadapi berbagai kendala dalam pemanfaatan teknologi. Keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat digital, serta rendahnya kemampuan teknologi baik pada guru maupun siswa menjadi hambatan utama. Akibatnya, peserta didik di daerah pedesaan tertinggal dalam hal literasi digital, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing mereka di masa depan.

Kesenjangan digital ini mempertegas bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga akses terhadap perkembangan teknologi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi pendidikan, akses terhadap teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas kesempatan belajar peserta didik. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan modern yang mendorong terciptanya pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan berbasis pada kebutuhan peserta didik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) yang cukup tajam antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang berdampak signifikan terhadap pemerataan kualitas pendidikan.¹¹

Sekolah di daerah perkotaan umumnya telah mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran. Penggunaan internet dengan koneksi yang relatif stabil, ketersediaan perangkat seperti komputer, laptop, proyektor, serta pemanfaatan berbagai platform pembelajaran daring memungkinkan guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif. Peserta didik di perkotaan juga memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar digital, seperti e-book, video pembelajaran, jurnal online, dan aplikasi edukatif. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga mendorong berkembangnya kompetensi literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kemandirian belajar.

Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala serius dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet, baik dari segi jangkauan maupun kualitas koneksi, menjadi hambatan utama dalam mengakses pembelajaran

¹¹ A Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 32

berbasis digital. Selain itu, ketersediaan perangkat teknologi seperti komputer atau laptop masih sangat terbatas, bahkan dalam beberapa kasus tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital, baik pada guru maupun peserta didik, yang menyebabkan pemanfaatan teknologi belum dapat dilakukan secara optimal. Guru di daerah pedesaan seringkali belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung secara konvensional.

Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada kualitas dan pengalaman belajar peserta didik di daerah pedesaan. Mereka cenderung kurang mendapatkan akses terhadap informasi yang luas dan terkini, serta minim pengalaman dalam penggunaan teknologi yang menjadi kebutuhan penting di era modern. Akibatnya, peserta didik di pedesaan tertinggal dalam hal penguasaan literasi digital, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan persaingan global di masa depan.

Lebih jauh lagi, kesenjangan digital ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana fisik seperti gedung dan fasilitas sekolah, tetapi juga mencakup akses terhadap teknologi dan informasi. Tanpa adanya pemerataan akses teknologi, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil, penyediaan perangkat teknologi yang memadai, serta peningkatan kompetensi digital guru melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, kesenjangan digital dapat diminimalkan dan seluruh peserta didik, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di era digital.¹²

Faktor Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di daerah perkotaan, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif lebih tinggi memungkinkan adanya dukungan yang lebih besar terhadap pendidikan, baik melalui partisipasi orang tua, kontribusi masyarakat, maupun dukungan dari sektor swasta.

Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan fasilitas pendidikan. Banyak masyarakat yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga perhatian terhadap pendidikan menjadi kurang optimal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berdampak pada kurangnya kesadaran akan

¹² R Ananda and K O Banurea, "Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dan Permasalahannya," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2023, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i2.25539>. h. 143

pentingnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Faktor sosial lainnya seperti budaya dan pola pikir masyarakat juga turut memengaruhi. Di beberapa daerah pedesaan, pendidikan belum menjadi prioritas utama, sehingga upaya peningkatan fasilitas pendidikan tidak mendapatkan dukungan yang maksimal.

Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi lingkungan pendukung utama penyelenggaraan pendidikan. Di daerah perkotaan, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif lebih tinggi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fasilitas pendidikan. Masyarakat perkotaan umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui partisipasi dalam komite sekolah, sumbangan sukarela, maupun keterlibatan dalam program pengembangan sekolah. Selain itu, keberadaan sektor swasta dan dunia industri di wilayah perkotaan juga turut berperan dalam menyediakan dukungan, baik dalam bentuk bantuan fasilitas, program tanggung jawab sosial (CSR), maupun kerja sama dalam pengembangan sarana pendidikan berbasis teknologi. Kondisi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagian besar masyarakat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal, sehingga alokasi perhatian dan sumber daya untuk pendidikan menjadi terbatas. Kondisi ekonomi yang rendah juga berdampak pada minimnya kontribusi masyarakat dalam mendukung pengembangan fasilitas sekolah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut memengaruhi pola pikir dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah cenderung kurang memahami urgensi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang keberhasilan belajar anak.

Lebih lanjut, faktor sosial seperti budaya, nilai-nilai lokal, dan pola pikir masyarakat juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pendidikan di daerah pedesaan. Di beberapa wilayah, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan bukan merupakan prioritas utama, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Anak-anak seringkali lebih diarahkan untuk membantu pekerjaan orang tua daripada melanjutkan pendidikan secara optimal. Selain itu, kurangnya eksposur terhadap pentingnya pendidikan berkualitas juga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan fasilitas pendidikan.¹³

¹³ M Maila, M T Dalimunthe, and N D Kismadani, "Penyaluran Sarana Prasarana Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2023, <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/4819>. h. 318

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh aspek kultural dan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta penguatan peran orang tua dan komunitas dalam mendukung proses pendidikan. Pendekatan yang holistik dan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan secara bertahap.

Kebijakan dan Implementasi Pemerintah

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan unit sekolah baru, serta program digitalisasi pendidikan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Salah satu permasalahan utama adalah distribusi anggaran yang belum merata dan kurang tepat sasaran. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga tidak memberikan dampak yang optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa selain kebijakan yang tepat, diperlukan juga sistem implementasi yang efektif, transparan, dan akuntabel agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi gedung sekolah, serta program digitalisasi pendidikan yang bertujuan memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi. Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Salah satu permasalahan utama terletak pada distribusi anggaran yang belum merata dan seringkali kurang tepat sasaran. Alokasi dana pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk daerah tertinggal atau sekolah dengan kondisi paling membutuhkan, dalam praktiknya masih menghadapi persoalan administratif, data yang kurang akurat, serta mekanisme penyaluran yang belum optimal. Akibatnya, terdapat sekolah yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan justru

belum mendapatkan dukungan yang memadai, sementara sekolah lain yang relatif lebih baik kondisinya memperoleh alokasi yang lebih besar. Selain itu, perbedaan kapasitas manajerial antar sekolah juga memengaruhi kemampuan dalam mengakses dan mengelola dana yang tersedia.¹⁴

Di samping itu, lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi faktor lain yang memperburuk ketimpangan. Pengawasan yang kurang ketat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran, serta tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan. Evaluasi program yang belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan juga menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih efektif. Dalam beberapa kasus, bantuan sarana dan prasarana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitas, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih lanjut, kendala koordinasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan atau bahkan kekosongan intervensi di wilayah tertentu. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program di tingkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada sistem implementasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Diperlukan perbaikan dalam mekanisme perencanaan berbasis data yang akurat, peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, tujuan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.¹⁵

Dampak Kesenjangan terhadap Kualitas Pendidikan

Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan pada akhirnya berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Peserta didik di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas belajar, sehingga mampu mengembangkan potensi mereka secara optimal. Sementara itu, peserta didik di daerah pedesaan seringkali mengalami keterbatasan yang menghambat proses

¹⁴ M S P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019). h. 55

¹⁵ S Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). h. 82

belajar mereka. Dampak lainnya adalah munculnya ketimpangan hasil pendidikan, di mana siswa dari daerah perkotaan cenderung memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa dari daerah pedesaan. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan, karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan mobilitas sosial. Selain itu, kesenjangan ini juga dapat memengaruhi motivasi belajar siswa. Lingkungan belajar yang tidak memadai dapat menurunkan semangat belajar dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan, baik dalam aspek proses maupun hasil pembelajaran. Peserta didik di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas belajar yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium lengkap, perpustakaan yang kaya sumber belajar, serta dukungan teknologi digital. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi secara optimal melalui pengalaman belajar yang lebih variatif, interaktif, dan kontekstual. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, peserta didik di perkotaan cenderung lebih mudah memahami materi, aktif dalam proses pembelajaran, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Sebaliknya, peserta didik di daerah pedesaan seringkali menghadapi berbagai keterbatasan yang secara langsung menghambat proses belajar mereka. Minimnya fasilitas pembelajaran, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, serta terbatasnya akses terhadap sumber belajar menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Siswa cenderung hanya menerima materi secara pasif tanpa adanya pengalaman belajar yang mendalam dan aplikatif. Akibatnya, kemampuan akademik maupun non-akademik siswa di daerah pedesaan menjadi kurang berkembang secara optimal.¹⁶

Dampak lebih lanjut dari kondisi ini adalah munculnya ketimpangan hasil pendidikan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Siswa dari daerah perkotaan umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik, baik dalam hasil ujian, kompetisi akademik, maupun keterampilan lainnya. Sementara itu, siswa di daerah pedesaan seringkali tertinggal dalam berbagai aspek tersebut. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan mobilitas sosial, sehingga kesenjangan pendidikan berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah.

Selain itu, kesenjangan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap aspek psikologis peserta didik, khususnya dalam hal motivasi dan minat belajar. Lingkungan belajar yang tidak

¹⁶ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). h. 104

memadai, seperti ruang kelas yang rusak, kurangnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan media pembelajaran, dapat menurunkan semangat belajar siswa. Kondisi ini membuat siswa menjadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kejenuhan dan penurunan minat terhadap pendidikan. Sebaliknya, lingkungan belajar yang lengkap dan nyaman mampu mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan bersemangat dalam belajar.¹⁷

Dengan demikian, kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, agar setiap peserta didik, tanpa memandang lokasi geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Upaya Mengatasi Kesenjangan

Untuk mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang berfokus pada daerah tertinggal
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan
3. Peningkatan akses dan kualitas teknologi pendidikan di daerah pedesaan
4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan sarana dan teknologi
5. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan
6. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan pendidikan

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkualitas. Untuk mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, diperlukan upaya yang komprehensif, terarah, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat. Penanganan kesenjangan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik yang menyentuh aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut.

¹⁷ Nelliraharti & Nida Jarmita, "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Journal of Education Science* 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.33143/jes.v1i1.4793>. h. 451

Pertama, peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang berfokus pada daerah tertinggal menjadi prioritas utama dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif dengan memberikan porsi anggaran yang lebih besar kepada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan, sehingga kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi perhatian utama, terutama dalam pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan ruang kelas yang layak, serta fasilitas pendukung seperti sanitasi, perpustakaan, dan laboratorium di daerah pedesaan.

Ketiga, peningkatan akses dan kualitas teknologi pendidikan di daerah pedesaan menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan era digital. Penyediaan jaringan internet yang memadai, perangkat teknologi seperti komputer dan proyektor, serta pengembangan platform pembelajaran digital perlu diperluas agar peserta didik di pedesaan tidak tertinggal dalam literasi digital. Keempat, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan sarana dan teknologi juga sangat diperlukan, mengingat guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Guru harus dibekali dengan keterampilan pedagogik berbasis teknologi agar mampu mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia.¹⁸

Kelima, pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda. Partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan moral, material, maupun keterlibatan dalam pengelolaan sekolah dapat membantu memperkuat ekosistem pendidikan di tingkat lokal. Keenam, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.¹⁹

Dengan adanya berbagai upaya strategis tersebut, diharapkan kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan secara signifikan. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong terciptanya sistem pendidikan nasional yang lebih adil, merata, inklusif, dan berkualitas, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal tanpa terpengaruh oleh letak geografis maupun kondisi sosial ekonomi.

¹⁸ Karmiati & Muh Hanif, "Transformasi Digital Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/im.v9i01.9491>. h. 82

¹⁹ Azizah, "Kesenjangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan PAUD Di Indonesia." h. 55

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap kualitas proses serta hasil pembelajaran. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap, akses teknologi yang lebih baik, serta dukungan lingkungan yang lebih memadai dibandingkan dengan sekolah di pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, sarana pembelajaran, dan akses digital. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, sosial, serta belum optimalnya pemerataan kebijakan pendidikan. Dampaknya, terjadi perbedaan peluang belajar dan perkembangan peserta didik yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan demi terciptanya sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada lembaga Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R, and K O Banurea. (2023). "Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dan Permasalahannya." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i2.25539>.
- Arikunto, S. (2018) *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Astuti, N, and S Maisaroh. (2024) "Problematisasi Minimnya Sarana Dan Prasarana Di Sekolah 3T." *Jurnal Pendas* 10, no. 2. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.28351>.
- Azizah, A N. (2024) "Kesenjangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan PAUD Di Indonesia." *Early Childhood Education and Development Journal*, <https://doi.org/10.20961/ecedj.v4i2.60698>.
- Creswell, John W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications,
- Hafizi, M Z, S Pratama, K M F Putri, F B Panamuan, E Manalu, and F G N Rahma. (2024). "Dampak Kemiskinan Terhadap Sarana Dan Prasarana Pendidikan." *Tamaddun Journal*, <https://doi.org/10.70115/tamaddun.v2i3.312>.
- Hanif, Karmiati & Muh. (2025). "Transformasi Digital Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/im.v9i01.9491>.
- Hasibuan, M S P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaelani, M N G, Zulfitri, and Y Prapantja. (2025). "Transformasi Digital Pendidikan Dasar Dan Kesenjangan Layanan Di Indonesia." *EDUTECH*,

<https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech/article/view/96662>.

- Jarmita, Nelliraharti & Nida. (2025). "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran." *Journal of Education Science* 1
<https://doi.org/https://doi.org/10.33143/jes.v11i1.4793>.
- Lestari, C, R D Pratiwi, D J Pratama, and S Safitri. (2025). "Kesenjangan Digital Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan." *RISOMA Journal* 3, no. 4 <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.783>.
- Maila, M, M T Dalimunthe, and N D Kismadani. (2023). "Penyaluran Sarana Prasarana Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*,
<https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/4819>.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana,
- Rawis, J A M, S D M Sumual, F Akay, C Berhandus, and F A Razak. (2024). "Transformasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Teoritis Dan Pendekatan Strategis Di Era Digital." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 4
<https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1213>.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Tilaar, H A R. (2015). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, A. (2020). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.